

PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA *

*Oleh: M u h a i m i n ***

ABSTRACT

Religion Court has a duty and an authority to investigate, decide, and settle cases in first level among Moslems in : a. marriage; b. inheritance, wasiah, and hibah that can be executed according to Islamic Law; c. wakaf and shadaqah (Article 49 (1) Act 7 of 1989). Religion Court also settles cases that can be remanded by non-moslems.

This research examines consideration and legal consideration of Religion Court judge in settling cases remanded by non-moslems.

Research data were taken by studying 30 case documents from 3 samples of Religion Court in Yogyakarta Special Province. Besides that, this research was completed by conducting interview with 3 informants from Religion Court. After collecting data, it was analyzed by descriptive-qualitative method.

The research shows that judge consideration in settling cases remanded by non-moslems is guided on case, not on a person who remands a case, based on Article 49 Act 7 of 1989)

I. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1) UU No.7 tahun 1989). Kompetensi absolut Pengadilan Agama tersebut jika dilihat dari subyek pencari keadilannya berarti hanya orang-orang yang beragama Islam sajalah yang dapat beracara di lingkungan Pengadilan Agama. Sedangkan jika

dilihat dari jenis perkaranya berarti Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah.

Dalam praktik sering Pengadilan Agama menerima perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak non muslim, atau campuran antara muslim dan non muslim, karena berbagai kepentingan. Misalnya dalam permohonan itsbat nikah dari orang tua muslim, namun permohonan diajukan oleh anaknya yang non

¹ Laporan Penelitian 2003.

* S.H., K.N., Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UGM.

muslim, sebagai bukti ahli waris, bukti sebagai suami atau istri, untuk pengurusan hak pensiunan, dan sebagainya.

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang penting di lingkungan peradilan agama, senantiasa dituntut untuk dapat menemukan hukumnya terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, guna memenuhi, tidak saja rasa keadilan masyarakat tetapi juga sekaligus kepastian hukum.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Apa pertimbangan dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh pihak orang-orang yang tidak beragama Islam?

III. Pembahasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan untuk mengadili (Pasal 23 UU No.14 tahun 1970). Alasan-alasan atas argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim pada putusan-putusan yang dihasilkan nya, terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya².

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya³.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar keputusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan

diketahui melalui pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkwalisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti⁴.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, demikian Pasal 178 ayat(1) HIR, 189 ayat (1) Rbg.⁵

Hukum material kewarisan Islam yang dipergunakan di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang diajukan kepadanya pada masa lalu (sebelum adanya KHI) berpedoman pada berbagai kitab fiqh yang disusun oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Kemudian pada tahun 1958 dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tidak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab fiqh berikut ini:

- 1) *Al Bajuri*;
- 2) *Fathul Muin dengan syarahnya*;
- 3) *Syarqawi alat tahrir*;
- 4) *Qulyubi/Muhalli*;
- 5) *Fathul Wahab dengan syarhnya*;
- 6) *Tuhfah*;

² Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta. hlm.13

³ *ibid.*, hlm. 158

⁴ *ibid.*, hlm. 159

⁵ *ibid.*, hlm. 159

- 7) *Targhibul Musytaq*;
- 8) *Qawaninusy Syari'yah lissayid Shadaqah Dakhlan*;
- 9) *Qawaninusy Syari'yah lissayid Usman bin Yahnya*;
- 10) *Syamsuri lil Fara'id*;
- 11) *Bughyatul Mustarsyidin*;
- 12) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*;
- 13) *Mughnil Muhtaj*.

Umumnya kitab-kitab fiqh di atas adalah kitab-kitab kuning dalam mazhab Syafi'i, kecuali kitab *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah* yang termasuk bersifat komparatif⁶. Hukum material tersebut belum memadai, sehingga sering dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus⁷. Disamping itu keberadaan kitab-kitab tersebut membuka peluang terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab yang memang tidak menguntungkannya, seraya menunjuk kitab yang menawarkan penyelesaian yang berbeda.

Akibatnya lahirlah putusan-putusan yang bersifat berdisparitas tinggi, sebab tidak ada standar hukum yang bersifat *unified legal frame work*⁹. Keadaan ini telah menyebabkan hal-hal¹⁰:

- 1) ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu
- 2) ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syari'ah Islam itu
- 3) akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan

dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Situasi hukum Islam seperti yang digambarkan di atas, merupakan salah satu alasan yang mendorong Mahkamah Agung mengadakan Kompilasi Hukum Islam, sehingga umat Islam Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.¹¹

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan
- b. kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. wakaf dan shadaqah (Pasal 49 ayat (1) UU No.7 tahun 1989).

Keberadaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ini kemudian diikuti dengan terbentuknya Kompilasi Hukum Islam dengan landasan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yang merupakan sarana hukum positif dalam melengkapi pilar Pengadilan Agama di Indonesia di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf¹².

- a. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama;¹³ (Mukti Arto, 2003:1-6)

Tugas Pokok Pengadilan Agama: Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa dan

⁶ Idris Djakfar, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka, Jakarta, hlm. 27.

⁷ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademindo Pressindo, Jakarta, hlm. 22.

⁸ Bustanul Arifin, 1993, "Kompilasi Fiqh dalam Bahasa Undang-undang", *Majalah Pesantren*, No.2 Vol.II, Jakarta, hlm. 27.

⁹ Yahya Harahap, 1989, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 2

¹⁰ Masrani Basran, 1986, "Kompilasi Hukum Islam". *Mimbar Agama*, No.104 Tahun X April, Jakarta, hlm. 7

¹¹ Idris Djakfar, *op.cit.*, hlm. 27.

¹² *ibid.*, h. 9.

¹³ Mukti Arto, 2003, *Praktik Acara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan ke empat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-6.

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970), termasuk di dalamnya menyelesaikan perkara Voluntair (penjelasan Pasal 2 (1) tersebut).

Wewenang Pengadilan Agama; berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan – perundangan lainnya yang berlaku, antara lain: UU No. 1 1974, PP No.28/1977, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenak No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.

Kompilasi hukum Islam yang berdasarkan Inpres No. 1/1991 dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan.

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum tentang : Anak dalam kandungan; kelahiran; pemeliharaan anak; Perkawinan; Hak dan kewajiban suami-isteri; Harta perkawinan; Perceraian; Pemeliharaan orang tua; Kematian; Kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh.

b. Macam-macam Perkara di Pengadilan Agama

Masalah-masalah sengketa dan hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Anak dalam kandungan; tentang sah tidaknya kehamilan; status anak dalam kandungan sebagai ahli waris; bagian warisan anak dalam kandungan; kewajiban orang tua terhadap anak dalam kandungan
- 2) Kelahiran: penentuan sah/tidaknya anak; penentuan asal-usul anak; penentuan status anak/pengakuan anak.
- 3) Pemeliharaan anak: Perwalian terhadap anak; pencabutan kekuasaan orang tua; penunjukan /penggantinya wali; pemecatan wali; kewajiban orang tua/wali terhadap anak; pengangkatan anak; anak sipil, anak telantar; sengketa hak pemeliharaan anak; kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat; pembatalan pengangkatan anak; penetapan bahwa ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 4) Perkawinan(akad Nikah): Sengketa pertunangan dan akibat hukumnya; dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita; ijin kawin dari orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun; wali adhol; pencegahan kawin; penolakan kawin oleh PPN; ijin beristri lebih dari seorang; penetapan sahnya perkawinan; pembatalan perkawinan; penolakan ijin perkawinan campuran oleh PPN; penetapan sah/tidaknya rujuk.
- 5) Hak dan kewajiban suami-isteri: Mahar; penghidupan isteri; gugatan atas kelalaian suami terhadap isteri; penetapan nusyuz; perselisihan suami-isteri; gugatan atas kelalaian isteri; muth'ah; nafkah iddah; sengketa tempat kediaman bersama suami-isteri.
- 6) Harta benda dalam perkawinan: Penentuan status harta benda dalam perkawinan; perjanjian harta benda dalam perkawinan; pembagian harta benda dalam perkawinan; sengketa pemeliharaan harta benda dalam

perkawinan; sita marital atas harta perkawinan; sengketa hibah; sengketa wakaf; harta bawaan suami-isteri.

- 7) Putusnya Perkawinan: Penentuan putusnya perkawinan karena kematian; perceraian atas kehendak suami (cerai talak); perceraian atas kehendak isteri (cerai gugat yang di dalamnya meliputi masalah tentang Li'an, khuluk, fashakh, dan sebagainya); putusnya perkawinan karena sebab-sebab lain.
- 8) Pemeliharaan orang tua: kewajiban anak terhadap orang tua; kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkat.
- 9) Kematian: Penetapan kematian secara yuridis; penetapan sah/tidaknya wasiat.
- 10) Kewarisan: Penentuan ahli waris; penentuan mengenai harta peninggalan; penentuan bagian masing-masing ahli waris; pembagian harta peninggalan; penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris; pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak; baitul mal.

Pengadilan agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara-perkara tersebut bagi mereka yang beragama Islam, baik yang diajukan dalam bentuk *contentious* maupun *voluntair*.

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

b. Asas Personalitas Keislaman.

Ada dua asas untuk menentukan kekuasaan absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila :

1. Suatu perkara menyangkut status hukum seseorang muslim atau
2. Suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai seorang muslim, dalam keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 49 UU no.7/19879.

Atas dasar itu, maka :

1. Sengketa mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dan segala akibat hukumnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama.
2. Harta waris orang yang beragama Islam dibagi secara Islam dan apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Agama¹⁴.

Tabel 1

Jenis Perkara yang Diajukan Orang-orang yang Tidak Beragama Islam di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta

N= 23

PENGADILAN AGAMA	JENIS PERKARA				JUMLAH
	CERAI	POLIGAMI	WARIS	MAFQUD	
YOGYAKARTA	9	2	1	-	12
S L E M A N	6	-	-	-	6
B A N T U L	4	-	-	1	5
JUMLAH	19	2	1	1	23

Sumber : Data Primer 2003

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6

Data penelitian berupa 30 berkas perkara yang ditargetkan, sampai penelitian berakhir berhasil dikumpulkan sebanyak 23 berkas perkara (77 %), berasal dari Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta 12 berkas perkara, PA Sleman 6 perkara, dan PA Bantul 4 perkara. Jadi kurang 7 berkas perkara (3 %), hal ini disebabkan ada pembatasan pengambilan data penelitian khususnya di PA Sleman dan PA Bantul. Dengan demikian sampel penelitian ini cukup signifikan untuk mewakili keadaan populasi, yakni Pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, data penelitian berhasil dilengkapi wawancara dari para nara sumber yakni Ketua Pengadilan Agama yang menjadi sampel penelitian ini.

Data penelitian yang berupa 23 berkas perkara tersebut jika dilihat dari jenis perkaranya akan nampak sebagai berikut:

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam ke Pengadilan Agama Yogyakarta adalah perkara perceraian, dengan jumlah terbanyak yakni 19 perkara, kemudian poligami sebanyak 2 perkara, dan masing-masing 1 perkara untuk perkara kewarisan dan mafqud.

Jika dilihat dari jenis agama dan kedudukan para pihak, akan nampak sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Agama dan Kedudukan para Pihak
N=46

NO	AGAMA	PENGGT	TERGT	PEMOHN	TERMOHN	JML
1	ISLAM	1	4	-	1	6
2	KATHLK	10	8	1	-	19
3	KRISTN	14	7	-	-	21
JML		25	19	1	1	46

Sumber : Data Primer, 2003

Catatan: jumlah perkara = 23, masing-masing ada 2 pihak.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa agama para pihak yang tidak beragama Islam, yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama

Yogyakarta adalah berturut-turut sebagai penggugat yang beragama Kristen 14 orang, yang beragama Katholik 10 orang, sedangkan sebagai tergugat 8 orang beragama Katholik, 7 orang beragama Kristen, dan hanya ada 1 pemohon yang beragama Katholik. Dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta memang telah menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam.

1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam.

Dari 23 berkas perkara yang menjadi sample penelitian, ada 22 berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama dengan tanpa menyebutkan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan Agama. Dan hanya ada 1 perkara yang mencantumkan pertimbangan dan dasar hukum yang menyangkut kompetensi Pengadilan Agama.

Menurut keterangan dari para nara sumber, hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kekuasaan absolut Pengadilan Agama sebagai peradil Islam didasarkan atas "asas personalitas keislaman", yang menyatakan

bahwa:” Apabila terjadi peristiwa hukum yang mengenai orang Islam, atau mengenai status hukum orang Islam, atau mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang Islam, atau mengenai hak dan kewajiban orang Islam, atau mengenai lembaga keagamaan dalam Islam maka berlaku hukum Islam, dan apabila terjadi sengketa maka diselesaikan menurut hukum Islam lewat hakim peradilan Islam”.

Berlakunya hukum Islam atas orang Islam berdasarkan atas teori kredo, yakni bagi mereka yang menyatakan diri atau dikenal oleh masyarakat sebagai muslim maka berlaku hukum Islam.

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberikan porsi kekuasaan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara perdata tertentu mengenai orang yang beragama Islam atau lembaga keagamaan Islam di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shodaqaoh orang Islam atau lembaga agama dalam hukum Islam.

Berdasarkan asas personalitas keislaman, maka apabila sengketa mengenai peristiwa hukum, status hukum, perbuatan hukum, hak dan kewajiban hukum orang Islam atau lembaga keagamaan dalam Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama.

Jadi berdasarkan asas personalitas keislaman, kekuasaan absolut Pengadilan Agama didasarkan atas substansi perkara, bukan pada pihak yang berperkara karena asas personalitas keislaman itu melekat pada substansi perkara bukan pada orang yang berperkara, hal ini berarti bahwa :

- a) sepanjang substansi perkara itu berkenaan dengan peristiwa hukum, status hukum, perbuatan hukum, hak dan kewajiban hukum orang Islam atau lembaga keagamaan dalam Islam maka hal itu menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama.
- b) Setiap orang, apapun agama yang dianutnya, boleh berperkara di muka Pengadilan Agama dan berhak untuk mendapat-

kan pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam sepanjang mereka mempunyai kepentingan hukum dengan substansi perkara dan perkara itu berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.

- c) Perbedaan agama pihak-pihak dalam perkara tidak menghilangkan atau mengurangi hak untuk berperkara di muka Pengadilan Agama dan tidak pula berpengaruh terhadap kekuasaan absolut Pengadilan Agama.
- d) Hukum materiil Islam adalah melekat atau diterapkan pada substansi perkara bukan pada orang yang berperkara. Hakim wajib menerapkan hukum materiil terhadap substansi perkara dan menerapkan hukum formil terhadap pihak –pihak yang berperkara.
- e) Orang (pihak) yang berperkara bukan terikat pada hukum materiil melainkan pada hukum formil. Orang (pihak) yang berperkara akan terikat dengan hukum materiil manakala hukum materiil menghendaki demikian dimana pihak tersebut merupakan pihak dan sekaligus pelaku atau obyek dalam substansi perkara.

Prinsip-prinsip tersebut di atas tidak perlu disebutkan dalam putusan atau penetapan hakim kecuali ada eksepsi dari pihak lawan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, No. 83/Pdt.G/1977/PA.JK. tentang Gugatan harta warisan, yang inti duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa JZL seorang janda beragama Islam mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum suaminya (MH beragama Islam) berupa tanah SHM No. 924. Ke Pengadilan Agama Yogyakarta terdaftar perkara no.83/Pdt.G/1977/PA.JK, tanggal 6 Mei 1997, karena JZL menghendaki harta warisan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

- b) Bahwa para Tergugat yakni saudara-saudara kandung dan anak-anaknya saudara kandung almarhum suami JZL sejumlah 15 orang, 5 diantaranya beragama Katholik, menghendaki pembagian menurut hukum adat. Maka mereka juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terdaftar tanggal 15 April 1977 dengan No. 35/Pdt.G/1977/PN.JK.
- c) Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama, para tergugat tersebut mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut). Dengan mengatakan bahwa karena ada para Tergugat yang tidak beragama Islam maka sesuai dengan pasal 49 UU no 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini.
- d) Bahwa sehubungan dengan pihak Tergugat mengajukan Eksepsi kompetensi absolut tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan Putusan Sela yang berisi amar: Pengadilan Agama menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan mengemukakan alasan hukum sebagai berikut: bahwa di dalam Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21 s/d 23 Maret 1985, telah diambil kesimpulan tentang titik singgung Yurisdiksi Peradilan Agama dengan Peradilan Umum sebagai berikut: "Pemecahan masalah sengketa waris adalah bila terjadi perbedaan agama diantara Pewaris dengan ahli waris atau diantara para ahli waris, maka hukum waris yang diperlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi di pewaris (orang yang meninggal dunia), dan dalam perkara ini, tidak dibantah bahwa pewaris almarhum MH sampai akhir hayatnya tetap memeluk agama Islam. Dengan pertimbangan ini, karena pewaris beragama Islam, maka Pengadilan Agama Yogyakarta adalah berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat tersebut, patut ditolak.
- e) Para Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya antara lain sebagai berikut:
- (1) Perihal eksepsi Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, karena Tergugat tidak pernah mengajukan bahwa perkara ini telah digugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 35/Pdt.G/1977/PN.Jk. dan telah berkekuatan hukum tetap, maka asas *nebis in idem*, tidak bisa diterapkan dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan pasal 49(3) huruf b dari UU No.7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.
 - (2) Apabila ada perbedaan agama diantaranya pewaris dengan ahli waris atau diantara ahli waris, maka hukum waris yang diperlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris. Dan HM yang sampai wafatnya tetap beragama Islam, maka penyelesaian harta warisnya harus dilakukan menurut hukum Islam.
 - (3) Dengan pertimbangan di atas, maka putusan Hakim pertama Pengadilan Agama dapat dikuatkan.
- f. Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas dan mengajukan kasasi. Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya mempertimbangkan yang intisarinya antara lain (1) Yudex facti tidak salah menerapkan hukum namun demikian Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama tersebut memperbaiki Amar Putusannya Pengadilan Agama mengenai ahli waris yang non Islam, dimana mereka ini berhak mendapat warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim. (2)

Berdasarkan atas pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya antara lain, adalah mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 007/Pdt.G/1988/PTA. YK, sehingga berbunyi sebagai berikut: menyatakan permohonan banding dapat diterima. Dalam eksepsi ;menolak eksepsi Tergugat.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diangkat abstrak hukum:” bahwa ahli waris non muslim, berhak bersama-sama mewaris dengan kadar bagian yang sama dengan bagian ahli waris muslim dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris muslim atas dasar hukum wasiat wajibah”.

2. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam.

Dalam Tabel I telah nampak bahwa jenis perkara di Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, ada 19 perkara berupa perkara perceraian, 2 jenis perkara poligami, satu jenis perkara waris, dan satu jenis perkara mafqud.

a. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 19 perkara perceraian yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.
- 2) Pasal 116 KHI jo pasal 19 PP 9 tahun 1975
- 3) Pasal 119 ayat (2) KHI jo Pasal 70 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Jo. Kitab Al-Bajuri Juz II hal.354 yang berbunyi “ dan jika Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya Majelis Hakim dapat menerimanya

dan menjatuhkan putusannya “.

- 4) Pasal 125 HIR tentang Verstek
- 5) Kitab al-Manar Juz II hal. 159 Jo Al-Anwar Juz II hal. 149, yang berbunyi” Apabila (tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan”
- 6) UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39
- 7) Pasal 26 PP 9 Tahun 1975 tentang cara panggilan kepada para pihak
- 8) Himpunan nash dan hujjah syar’iyyah hal.105 jo Kitab Al-Muhadzab Juz 2 hal.45 yang berbunyi “apabila suami-isteri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau itu terjadi sebelum dhukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dhukhul maka perceraian nya jatuh setelah habis masa iddah”.
- 9) Pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- 10) Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, tentang alasan perceraian
- 11) Kitab Syarqowi Alat Tahriri hal.402 yang berbunyi :’Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhkan talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafalnya.
- 12) Pasal 84 UU No.7 tahun 1989 pasal 29 Jo PMA No.2 tahun 1990 tentang pencatatan perceraian
- 13) Pasal 22 PP No 9 tahun 1975 jo pasal 76 UU No.7 tahun 1989 tentang alasan-alasan perceraian
- 14) Qs Ar-Ruum ayat (21) jo UU No.1 tahun 1974 tentang Tujuan perkawinan
- 15) Pasal 105 KHI tentang pemeliharaan anak

Dari dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama terhadap 19 kasus perceraian tersebut di atas, nampak hanya berupa dasar hukum yang berkenaan dengan substansi/pokok perkara yang sifatnya kasuistik artinya dasar hukum yang pas/sesuai dengan posisi kasus atau posisi kasusnya, tidak ada satupun dasar hukum yang berkaitan dengan kompetensi absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama, dasar hukum hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kompetensi absolut hanya akan ditunjukkan dalam putusan atau penetapan, apabila ada pihak yang mengeksepsi perkara tersebut, jika tidak ada pihak yang mengajukan eksepsi maka para pihak dianggap menerima dan mengakui kompetensi Pengadilan Agama.

b. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 2 perkara poligami yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 127, 271, dan 272 RV
- 2) Pasal 2 ayat (1) Kepmenag No.126 / 1988 jo Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 tentang biaya perkara
- 3) Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974
- 4) Pasal 41 PP No.9 Tahun 1975
- 5) Pasal 57, Pasal 58 Pasal 55 KHI
- 6) Qs An-Nisaa ayat (3) : "maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja....."

Pada umumnya dasar hukum yang dipergunakan hakim pengadilan agama tersebut, berkaitan dengan substansi perkara poligami kecuali Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989, pasal ini dipergunakan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara poligami, dimana pihak Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Katholik, dan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut agama Katholik dan

telah mendapat Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Antonius Yogyakarta No. 439 Tahun 1978 dan Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) No. 439 Tahun 1978 dari Gereja tersebut. Jadi berdasar ketentuan pasal 58 UU No.7 Tahun 1989 yang berbunyi : "ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", Hakim Pengadilan Agama berpendapat berwenang mengadili perkara tersebut, karena Hakim tidak boleh membedakan orang, termasuk orang-orang yang beragama tidak Islam (Termohon), apalagi pihak Pemohon beragama Islam serta secara substansi perkara poligami memang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, walaupun pernikahan pemohon dilaksanakan secara Katholik. Jadi pendapat hakim tersebut dapat dibenarkan selain berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 juga Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.

c. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 1 perkara kewarisan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, adalah sebagai berikut:

- (1) Qs An-Nisaa ayat (12) yang artinya: "para isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ harta yang ditinggalkan, jika kamu mempunyai anak. Jo Pasal 172 jo 174 jo 180 KHI
- (2) Qs An-Nisaa ayat (76) bahwa: "Bagian seorang saudara lelaki sebanyak dua bagian saudara perempuan". Jo Pasal 171, 172, 174, 92, 185 KHI.
- (3) Hadits Nabi dalam Kitab Kifatul Ahyar juz II hal.18 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang muslim tidak mewarisi harta peninggalan orang non muslim, dan orang muslim tidak akan mewarisi harta peninggalan orang muslim". Jo Pasal 71 KHI

(4) Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989

Dasar hukum tersebut di atas digunakan hakim Pengadilan Agama untuk menolak eksepsi Tergugat dan memutuskan pokok perkaranya. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama dengan menggunakan dasar Pasal 49 dan 50 UU No.7 Tahun 1989. Dalam Kasasi Majelis Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Agama, dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama, menyangkut pokok perkara yakni memberikan hak bagian kepada ahli waris non muslim berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris muslim.

- d. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan 1 perkara mafqud yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, adalah sebagai berikut:

Perkara tersebut diajukan oleh Pemohon beragama Katholik, sedangkan termohon beragama Islam. Perkara ini akhirnya dicabut oleh Pemohon, dan Hakim menggunakan

ketentuan Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 hanya untuk menetapkan beban biaya perkara kepada Pemohon, sedangkan dasar hukum lain yang menyangkut kompetensi Pengadilan Agama tidak terdapat dalam putusan tersebut, karena memang tidak ada pihak yang mengajukan eksepsi atas perkara tersebut.

IV Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam adalah :
(a) Berdasarkan agama para pihak, dan
(b) berdasarkan substansi perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.
2. Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam adalah : Al-Qur'an; Al-Hadits; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1989; HIR,RV; PP No. 9 Tahun 1975; Kepmenag; Permenag; Kitab-kitab Fiqh; dan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Arifin, Bustanul, 1993, "Kompilasi Fiqh dalam Bahasa undang-undang", *Majalah Pesantren* No.2 Vol.II, Jakarta.
- Basran, Masrani, 1986, "Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Agama*, No. 104 Tahun X April, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1990, *Hukum Waris Islam*, Edisi ke IX, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Djakfar, Idris, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Pertama, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1974, *Alqur'an dan Tarjamahnya*, Jakarta
- Harahap, Yahya, 1989, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta
- Mukti Arto, 2003, *Praktik Acara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke empat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*